

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KALURAHAN
(IPPKal)



PEMERINTAH KALURAHAN GAYAMHARJO
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024



Kabupaten
Sleman

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN GAYAMHARJO TAHUN 2024



Lurah
Gayamharjo

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Kalurahan Gayamharjo yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Gayamharjo Tahun 2024.

Penyusunan dan penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini merupakan pemenuhan dari tanggung jawab kami sebagai Lurah kepada masyarakat Kalurahan Gayamharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan tahun 2022. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini juga merupakan kewajiban Lurah dalam pelaksanaan ketentuan dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dimana Kepala wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam hal ini website kalurahan Gayamharjo yaitu gayamharjosid.slemankab.go.id

Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan secara keseluruhan sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Kalurahan Gayamharjo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Lurah Gayamharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027, yaitu dengan visi **“Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Gayamharjo yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berbudaya ”** Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan penjabaran dari visi dan merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan di desa, yakni :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik, profesional, bersih dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, yang berdasarkan pada demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengupayakan sarana dan pra sarana Kalurahan yang memadai dan merata bagi masyarakat dengan menerapkan pendekatan partisipatif
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik

5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut pada tahun 2024 telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kewenangan Kalurahan yang dilaksanakan dalam Peraturan Kalurahan Gayamharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, dan dianggarkan dalam Peraturan Kalurahan Gayamharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kalurahan Gayamharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian visi dan misi tersebut secara bertahap telah tertuang dan terwadahi dalam dalam 4 (empat) bidang kewenangan Kalurahan yang telah dilaksanakan pemerintah Kalurahan tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan:

1. Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Bupati. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan perangkat Kalurahan diambilkan dari Alokasi Dana Desa dan PBH tahun 2024.

2. Operasional Perkantoran Kalurahan

Kegiatan operasional perkantoran Kalurahan meliputi beberapa sub kegiatan yang merupakan rutinitas operasional kantor, antara lain untuk belanja ATK, belanja peralatan kantor, belanja perlengkapan kantor, belanja alat kebersihan, belanja cetak dan penggandaan, belanja langganan listrik, belanja surat kabar, belanja air serta belanja modal. Kegiatan operasional perkantoran kalurahan merupakan salah satu kegiatan yang menunjang seluruh kegiatan kantor Kalurahan berjalan dengan lancar terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan

Sebagai Mitra kerja Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) juga berhak untuk menerima dana operasional dan tunjangan bagi seluruh anggota BPKal. Selain menjalankan fungsi legalisasi dalam hal pembuatan peraturan Kalurahan, BPKal juga berperan sebagai wakil dari masyarakat sehingga dituntut untuk mampu menjaring aspirasi masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kalurahan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)

4. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dan imbasnya akan semakin meningkatkan perolehan pengembalian dana ke kalurahan sebagai salah satu sumber penerimaan kalurahan yang sah.

Kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi beberapa kegiatan lain yang saling terkait, antara lain:

- a) Kegiatan pembinaan dan penyampaian SPPT PBB.
- b) Kegiatan Intesifikasi/pekan pembayaran PBB

- c) Jemput bola pembayaran PBB
- d) Pembetulan/perubahan/pendaftaran/penghapusan/update data SPPT PBB.
- e) Pengajuan pengurangan PBB untuk tanah warga.
- f) Pembayaran PBB atas tanah kas desa.

5. Pembinaan Perangkat Kalurahan

Pembinaan perangkat kalurahan rutin dilaksanakan satu bulan sekali melalui kegiatan rapat koordinasi antara lurah dengan perangkat kalurahan adapun tujuan dari rapat koordinasi adalah untuk:

- a) Penyampain Laporan dari Dukuh kepada Lurah dan kepala seksi dan kepala urusan sesuai dengan tupoksi masing masing
- b) Penyampaian informasi dari Lurah Gayamharjo, kepala seksi dan kepala urusan disampaikan kepada dukuh untuk d informasikan kepada masyarakat.
- c) Penyampaian informasi dari instansi lebih tinggi baik dari kecamatan maupun kabupaten, dinas maupun instansi yang lain.

Sedangkan materi yang dibahas meliputi urusan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan rapat koordinasi intern, Pemerintah Kalurahan juga melaksanakan koordinasi dengan BPKal dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya dalam rangka merumuskan kebijakan kalurahan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

6. Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan

Kalurahan Gayamharjo merupakan salah satu kalurahan yang telah melaksanakan pengelolaan perustakaan kalurahan. Meski belum berjalan dengan baik, sementara koleksi buku yang dimiliki sebanyak 550 buah buku dengan berbagai judul. Arsip Kalurahan merupakan salah satu bukti otentik yang harus dijaga keberadaanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan arsip di Kalurahan juga semakin ditingkatkan.

7. Pengelolaan Aset Kalurahan

Aset Kalurahan merupakan kekayaan Kalurahan yang harus senantiasa dijaga keberadaanya.

Dengan adanya aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang diterapkan bagi semua desa se kabupaten sleman pada tahun 2024 ini akan mempermudah cara pengelolaan aset kalurahan

8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan oleh Tim pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang ditetapkan Lurah setiap tahun. Tim terdiri dari Carik selaku koordinator pelaksana serta kepala seksi/kepala urusan dan bendahara sebagai pelaksana teknis. Tata kelola keuangan dilakukan menggunakan Siskeudes secara online.

9. Penyusunan APBKal dan Perubahan APBKal

Penyusunan APBKalurahan dan Perubahan APBKalurahan merupakan tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh Lurah (siklus tahunan). Penyusunan APBKal dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan (disusun pada tahun sebelumnya). Pada tahun 2022 Pemerintah Kalurahan telah berhasil menyusun RPJMKal 2022-2027 dan RKPKal pada setiap akhir tahun. Pada akhir tahun 2024 lalu juga menyusun APBKal tahun 2025 sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perubahan APBKal dilaksanakan setelah APBKal berjalan selama 6 bulan, dengan kata lain perubahan APBKal dilaksanakan mulai bulan juli tahun berjalan. Pada tahun 2024 Kalurahan Gayamharjo telah menyelesaikan tugas penyusunan Perubahan APBKal tahun 2024 dengan Perkal no 2 Tahun 2024.

10. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBKalurahan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBKalurahan (Laporan realisasi APBKal semester satu, Laporan Realisasi APBKal semester akhir dan Laporan Pertanggungjawaban APBKal juga merupakan salah satu tugas wajib Lurah. Laporan Realisasi APBKal semester 1 dilaksanakan paling lambat bulan juli, sedangkan untuk Laporan Realisasi APBKal semester akhir/ LPJ paling lambat bulan maret tahun berikutnya.

Untuk RT/RW setiap tahun diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan sebagai penunjang kegiatan kelembagaannya sesuai dengan tugas dan fungsi RT/RW. Jumlah anggota BPKal sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari dan terbagi atas ketua, wakil ketua, Sekretaris dan ketua kelompok kerja dan anggota. Selama tahun 2024 BPKal telah melaksanakan musyawarah Kalurahan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam penyusunan RKPKalurahan, sedangkan sidang BPKal dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali untuk menyepakati peraturan kalurahan bersama dengan pemerintah kalurahan.

1. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah RT sebanyak 45 dan 17 RW. Koordinasi dilaksanakan dengan RT/RW dengan pemerintah Kalurahan guna menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan pemerintahan Kalurahan, yang dilaksanakan sekali dalam sebulan atau dalam waktu yang dibutuhkan.
2. Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas pamong kalurahan dilaksanakan pembinaan rutin sebagai sarana untuk koordinasi dan penyampaian informasi penting dan tindaklanjuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan masing-masing pelaksana teknis dan sekretariat. Pembinaan dengan mendatangkan narasumber dari kapanewon maupun dari kabupaten serta nara sumber lain
3. Pembinaan Linmas juga di anggarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi Linmas Kalurahan Gayamharjo yang selama ini belum di adakan Pembinaan Linmas , Narasumber dalam pembinaan Linmas dari Polsek dan Koramil Prambanan dengan harapan setelah diadakan Pembinaan Linmas personil Linmas kalurahan bisa lebih aktif dan tanggap dengan keadaan yang terjadi di lingkungan Kalurahan Gayamharjo.
4. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kalurahan juga dilakukan kegiatan musyawarah kalurahan atau rembug warga. Penyusunan RKPKal dilakukan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban disusun pula laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kepada BPKal serta memuat informasi penyelenggaraan pemerintah Kalurahan di media cetak atau web Kalurahan. Penjaringan aspirasi dilaksanakan di 7 (tujuh) padukuhan oleh BPKal dalam rangka penyusunan RKPKal 2025.
5. Dalam menata aset pemerintah alurahan dalam rangka peningkatan pendapatan asli kalurahan dilaksanakan pengelolaan aset kalurahan, antara lain dengan inventarisasi tanah kalurahan, penataan tanah kalurahan untuk perencanaan tempat wisata dan pengelolaan pasar desa.
6. Dalam rangka tugas pembantuan pencapaian pelunasan pajak bumi dan bangunan, dilaksanakan kegiatan intensifikasi PBB, fasilitas pekan pembayaran PBB dan juga *update* data PBB yang dilakukan disetiap padukuhan. Capaian pelunasan PBB di Kalurahan Gayamharjo tahun 2024 target Rp. 59.800.000 dari sebanyak 3.566 SPPT.

7. Pengelolaan perpustakaan kalurahan dilakukan untuk meningkatkan budaya baca dalam meningkatkan wawasan masyarakat terhadap berbagai bidang ilmu yang disediakan dalam bentuk buku bacaan. Penambahan jumlah koleksi buku terus ditingkatkan dengan berbagai jenis buku yang bermanfaat bagi warga kalurahan, seperti bidang pertanian, teknologi tepat guna, perikanan, peternakan, buku anak-anak dan jenis lainnya. Jumlah koleksi buku sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 550 dari berbagai macam judul. Perpustakaan kalurahan sering digunakan oleh masyarakat sambil menunggu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan
8. Guna memberikan pemahaman tentang peraturan yang dibuat Pemerintah Kalurahan , dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan kalurahan kepada tokoh masyarakat. Peraturan kalurahan yang disosialisasikan antara lain tentang pungutan kalurahan, APBKal, dan peraturan-peraturan lain diatasnya yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada warga masyarakat.
9. Dalam penyusunan regulasi ditingkat kalurahan pemerintah kalurahan bersama BPKal telah menetapkan program legislasi kalurahan untuk dibahas pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah peraturan kalurahan yang ditetapkan sebanyak 5 peraturan kalurahan.

10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan APBKal Tahun 2024

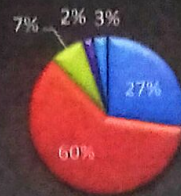
Pendapatan Kalurahan :

Jenis pendapatan	Jumlah
Pendapatan asli desa	3.000.000,00
Dana desa	1.234.734.000,00
Bagihasil pajak dan restribusi daerah	580.907.000,00
Alokasi dana desa	1.008.996,400,00
Bantuan keuangan dari Kabupaten	1.540.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	675.000.000,00
Pendapatan lain lain	2.500.000,00
JumlahPendapatan	5.045.137.400,00

Belanja Kalurahan:

Jenis belanja	Jumlah
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	1.452.388.738,06
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	3.185.924.660,00
Bidang pembinaan kemasyarakatan	374.485.000,00
Bidang pemberdayaan masyarakat	123.595.000,00
Bidang tak terduga	151.000.000,00
Jumlah Belanja	3.557.819.008,00
Surplus/Defisit	5.287.393.398,06
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	242.255.998,06

Prosentase Per Bidang Kegiatan APBKal Tahun 2022



- Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
- Bidang Pembangunan Desa
- Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan:

1. Talud Jalan
2. Corblok
3. Draenase
4. Gorong-Gorong
5. Pos Kamling
6. RTLH
7. Pembanguna tempat wisata
8. Pengaspalan Jalan
9. Ketahanan Pangan
10. Pembangunan Gedung PAUD
11. Padat Karya
12. Pembangunan Jembatan
13. PIPANISASI/jaringan air bersih

- a. Selain kegiatan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat non fisik yaitu pembinaan dan pengelolaan PAUD, Posyandu, dan fasilitasi kader kesehatan dan kader KB. Pembinaan dan pengelolaan untuk PAUD diberikan dalam bentuk uang operasional seperti pembelian alat bantu belajar mengajar, alat-alat permainan, dan juga pemberian insentif bagi guru PAUD.

Pembinaan dan pengelolaan Posyandu diberikan dalam bentuk uang pemberian makanan tambahan, pembelian alat-alat posyandu, dan insentif kader Posyandu. Sedangkan untuk kader kesehatan dan kader KB diberikan dalam bentuk fasilitasi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan dan juga insentif bagi mereka.

Jumlah guru dan pengelola PAUD sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 35 orang yang berasal dari warga setempat. Jumlah kader Posyandu sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 30 orang, dan kader kesehatan 30 orang serta kader KB sebanyak 12 orang.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan:

a. Pembinaan kelompok seni budaya dan pengembangan seni budaya lokal, melalui kegiatan pelaksanaan merti dusun, gelar potensi desa, peringatan hari jadi Sleman. Pembinaan kelompok seni budaya desa diberikan dengan mendatangkan pelatih. Jumlah kelompok seni budaya yang ada sebanyak 7 kelompok dengan jenisnya seperti kelompok jathilan, kelompok karawitan, Kethoprak, campur sari, ludruk orgen tunggal dan sholawat Nabi. Selain itu pengembangan seni budaya lokal dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok seni budaya untuk tampil dalam even-even yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan.

Pelaksanaan merti dusun dilakukan untuk mengirim doa untuk arwah para leluhur dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada di padukuhan yakni di pedukuhan Kalinongko Lor dan Nawung. Gelar potensi desa dilaksanakan bersamaan acara merti dusun, dimana dalam gelar potensi desa ini menampilkan potensi masing-masing padukuhan, dalam bentuk seni pertunjukan, kerajinan, olahan makanan, industri rumah tangga dan lain-lainnya. Dalam acara ini dapat menarik perhatian warga desa setempat dan sekitarnya dan dapat mendorong transaksi ekonomi lokal pedesaan.

Peringatan hari jadi Sleman, dilaksanakan sebagai wujud penghormatan dan *handarbeni* terhadap kabupaten Sleman. Peringatan ini dilakukan dengan pengiriman *bregada* untuk mengikuti upacara di kabupaten.

b. Pembinaan rois, sebagai salah satu unsur masyarakat peran rois masih sangat vital dalam penyelenggaraan urusan dan upacara keagamaan Islam. Pemerintah desa juga memberikan perhatian dengan memberikan pembinaan dan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari berbagai instansi, tidak hanya ilmu keagamaan tetapi juga pengetahuan lain seperti kesehatan, ketrampilan dan lain-lain. Peringatan hari besar agama Islam dilaksanakan untuk memperingati Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Hari Raya Idul Adha, Syawalan di Hari Raya Idul Fitri dengan maksud meningkatkan keimanan dan ketaqwaan perangkat desa beserta warga masyarakat dan mempererat tali persaudaraan antar warga terutama lembaga desa.

a. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan kalurahan dengan pembinaan LPMKal, PKK, Karang Taruna. Pemerintah kalurahan memberikan perhatian bagi lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Untuk itu kepada LPMKal, PKK dan Karang Taruna diberikan dana operasional dalam bentuk kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaganya.

LPMKal telah terbentuk dengan kepengurusan yang masih aktif, sedangkan di masing-masing padukuhan di 7 padukuhan sudah terbentuk sub unit LPMKal padukuhan. Lembaga PKK terbentuk dengan kepengurusan lengkap dan masing-masing padukuhan juga terbentuk kepengurusan PKK padukuhan. Demikian juga Karang Taruna kepengurusannya masih aktif. Kegiatan masing-masing lembaga tersebut didukung dengan penganggaran yang cukup dari APBKal.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan:

a. Pembinaan ekonomi usaha kecil, kelompok usaha ekonomi produktif antara lain :

1. Pelatihan memasak masakan lokal
2. Pelatihan Bengkel motor

3. Pembinaan Kelompok Tani
4. Pembinaan Kelompok Ternak

- b. Pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan kalurahan. Pelatihan diberikan kepada LPMKal dalam bidang perencanaan kalurahan yang diikuti oleh LPMKal dan sub unit LPM padukuhan sebanyak 24 orang dengan mendatangkan narasumber dari Kapanewon Prambanan.

Pelatihan bagi PKK dalam bentuk pelatihan manajemen organisasi bagi ibu-ibu pengurus PKK desa dan padukuhan, diikuti oleh 50 orang dengan narasumber Kapanewon Prambanan.

- c. Pengembangan kelompok tani juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kalurahan, kegiatan untuk menumbuhkan kelompok tani yang ada di desa Gayamharjo Pemerintah Kalurahan mengadakan pelatihan bagi Kelompok Tani yang ada di Kalurahan Gayamharjo ada 7 kelompok tani di Kalurahan Gayamharjo.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana di Kalurahan Gayamharjo pada tahun 2024 untuk kegiatan penanganan Penyakit Kuku dan Mulut / PMK termasuk pencegahan penyebaran wabah penyakit. Dampak dari adanya penyakit tersebut mengakibatkan harga ternak menurun drastis. Disamping tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kurang mampu di kalurahan gayamharjo dalam Anggaran kalurahan di anggarkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 47 KK penerima BLT-DD Tahun 2024 masing masing diberikan Rp.300.000,00 diberikan setiap 3 bulan sekali

Photo photo Kegiatan



Gedung Karang Taruna



Gedung PAUD



Rehap Rumah



Padat Karya



Padat Karya



Pembangunan Jembatan



Pengaspalan Jalan



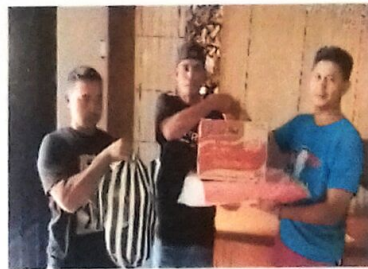
Pengaspalan Jalan



Rabat beton



Perencanaan Pembangunan Penyaluran Logistik Korban Bencana



Kampung KB



Posyandu lansia



Penyaluran BLT DD



Rakor KB



Posbindu Institusi



Pembinaan Keluarga Sembada



Merti Dusun



Koordinasi perangkat desa



Koordinasi dengan BPKal Kunjungan



TK Pertiwi



Pembinaan Keluarga



Rapat pembentukan bumkal



Lukadesi



Kerja bakti



PMT Balita



Porkal

Kegiatan di bidang kewenangan yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintah kalurahan, BPKal, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah kalurahan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Kami menyadari masih terdapat kegiatan di bidang kewenangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang telah disepakati bersama.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun 2024 kami sampaikan kepada warga masyarakat pada umumnya dan warga Kalurahan Gayamhajo pada khususnya, dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang lebih baik. Tanggapan dan masukan tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan

Gayamharjo dengan alamat Jali, Gayamharjo Prambanan Sleman atau melalui nomor telepon 081391233961 atau melalui email gayamharjoslemankab@gmail.com atau di "www.gayamharjosid.slemankab.go.id".

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Gayamharjo, 26 Maret 2025

